

## **BAB III**

### **ANALISIS**

#### **A. Pandangan Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia**

Perdebatan dan Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar. Demikian halnya dengan banyaknya perbedaan pendapat yang terkait tentang relasi Islam dan negara, khususnya menyangkut ide negara Islam ketika dihadapkan pada persoalan bagaimana menata hubungan agama dan negara. Secara kategorial, paling tidak ada tiga paradigma pemikiran politik Islam dalam melihat relasi agama dan negara.<sup>1</sup> *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*Integrated*). Paradigma ini menerangkan bahwa agama dan negara saling menyatu, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus, politik dan negara ada dalam wilayah agama. Karena agama dan negara menyatu maka ini berakibat masyarakat tidak bisa membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama, begitu juga sebaliknya. Karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap penguasa yang selalu berlindung dibalik agama maka otoritarianisme dan kesewenang-wenangan oleh penguasa tentu saja sangat potensial terjadi dalam negara dengan model seperti ini. Kepala negara merupakan “penjelmaan” dari Tuhan yang meniscayakan ketundukan mutlak tanpa ada alternatif

---

<sup>1</sup>[Http://dualmode.depag.go.id/acis10/file/dokumen/6.MarzukiWahid.pdf](http://dualmode.depag.go.id/acis10/file/dokumen/6.MarzukiWahid.pdf) , *Op. Cit*

yang lain. Atas nama “Tuhan” penguasa bisa berbuat apa saja dan menabukan perlawanan rakyat.

*Kedua*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (*simbiotik*). Paradigma ini menyatakan suatu hubungan agama dan negara yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang, sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. *Ketiga*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (*sekularistik*). Paradigma ini memisahkan agama atas negara dan memisahkan negara dari agama. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak Islam pada bentuk negara.

Masalah relasi Islam dan negara merupakan salah satu pemikiran Abdurrahman Wahid. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa arus pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai relasi Islam dan negara dapat dikategorikan sebagai pemikiran yang sekularistik, yaitu pemisahan antara agama dan negara, yang sejalan dengan pemikiran Ali Abd al-Raziq. Ia secara tegas menolak Islam dijadikan sebagai ideologi sebuah negara, ada dua alasan yang membuatnya menolak didirikannya negara Islam atau Islam dijadikan sebuah ideologi negara.

*Pertama*, argumentasi yang menyebutkan bahwa *Daulah Islamiyah* atau negara Islam tidak pernah disebutkan secara eksplisit atau detail dalam Al-Quran.

Memang ada dalam Al-Quran ayat yang berbunyi *Baladun Tyaibatun wa Rabbun Gafur*, sebuah ayat yang lebih pada konteks sosiologis, yaitu negara yang baik, penuh pengampunan Tuhan. Atas dasar inilah Islam tidak memberi konsep yang jelas, melainkan hanya memberi nilai etik bagi kehidupan bangsa dan negara. Dimana di dalam Islam hanya terdapat seperangkat nilai tata etika bagi kehidupan bernegara untuk menjadikan negara yang baik.

*Kedua*, argumentasi historis, yaitu yang berkaitan dengan fakta bahwa dalam sejarah Islam tidak pernah menunjukkan adanya mekanisme baku bagaimana suksesi dalam Islam. Ini bisa dilihat dari keempat khalifah sepeninggalnya Rasulullah, semuanya diangkat melalui mekanisme berbeda satu sama lain, menurut Abdurrahman Wahid ketika Rasulullah wafat, jenazahnya baru tiga hari dikubur karena menunggu pernyataan loyalitas (bai'at) rakyat pada penggantinya, Abu Bakar. Sementara sebelum Khalifah Abu Bakar wafat, ia sudah menunjuk Umar bin Khattab membentuk Ahli Hal Wal Aqdi, yang bertugas menunjuk pengganti Umar bin Khattab. Jadi, Islam tidak mempunyai konsep negara yang baku, padahal pengangkatan seorang kepala negara merupakan kunci utama untuk mengetahui sistem kenegaraan “kata Abdurrahman Wahid”.

Beliau berpendapat bahwa dalam Islam, negara itu adalah hukum (*al hukmu*) dan Islam sama sekali tidak mempunyai bentuk negara. Yang ada pada Islam adalah etika kemasyarakatan dan komunitas, Islam tidak mengenal konsep pemerintahan

yang definitif.<sup>2</sup> Dalam Islam hanyalah prinsip dasar berbangsa dan bernegara, seperti musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan, dan kebersamaan.

Selain itu, dalam konteks negara heterogen seperti Indonesia, menjadikan Islam atau agama apapun sebagai ideologi negara hanya akan memicu disintegrasi bangsa, karena menurutnya sangat tidak mungkin memberlakukan formalisme agama tertentu dalam komunitas agama masyarakat yang sangat beragam. Karena di Indonesia ini terdapat berbagai macam agama jadi tidak mungkin Islam dijadikan sebagai Ideologi sebuah negara, karena pasti agama lain merasa di nomor duakan. Oleh sebab itu, baginya pluralitas merupakan hukum alam atau *Sunnatullah* di negeri ini, dan seharusnya Islam dijadikan sebuah nilai etik sosial (*social ethics*), yang berarti Islam berfungsi komplementer (sebagai pelengkap) dalam kehidupan negara. Di mana Islam itu dijadikan sebagai *al-hukmu* atau aturan yang menegaskan bahwa Islam bertugas melestarikan sejumlah nilai dan perilaku sosial yang mengaitkan pencapaian tujuan dengan kemuliaan cara yang digunakan.

Baginya Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, toleran dan keadilan. Untuk itu Abdurrahman Wahid sepakat dengan aksioma (kebenaran) bahwa Islam adalah agama pembebasan (*a liberating religion*).<sup>3</sup> Dimana Islam memberikan hak atas sebuah ideologi terhadap negara, yang tidak mengharuskan Islam yang menjadi ideologi sebuah negara namun di dalam negara tersebut haruslah mempunyai

---

*Op. Cit* <sup>2</sup>[Http://mustari64.blogspot.com/2010/05/kh-abdur-rahman-wahid-hubungan-agama.html](http://mustari64.blogspot.com/2010/05/kh-abdur-rahman-wahid-hubungan-agama.html),

<sup>3</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur*, *Op. Cit*, h. 127.

tata aturan ataupun etika dalam bernegara. Jelaslah dengan demikian, menurutnya Islam berfungsi sebagai etika sosial yang memandu jalannya kehidupan bernegara bukan sebagai bentuk kenegaraan tertentu.

Berkaitan dengan ideologi Pancasila yang ia sampaikan sebagai ideologi negara yang ideal, bagi Abdurrahman Wahid Pancasila adalah ideologi nasional yang esensial untuk mempertahankan kesatuan nasional. Pandangan ini menurutnya penting untuk disampaikan karena beberapa muslim memandang Pancasila sebagai ideologi sekular yang tidak sesuai dengan Islam. Lebih dari itu, Abdurrahman Wahid juga menyatakan bahwa tanpa Pancasila negara Indonesia akan bubar, ideologi ini merupakan asas negara yang harus kita miliki dan perjuangkan. Abdurrahman Wahid menyampaikan Pancasila ini akan saya pertahankan dengan nyawa saya sendiri, tidak peduli apakah ia dikebiri angkatan bersenjata, dimanipulasi umat Islam, atau malah disalahgunakan oleh keduanya. Dari argumen itu dapat dikatakan, seorang Abdurrahman Wahid lebih setuju dengan asas Pancasila untuk digunakan di dalam negara Indonesia, yang mana Pancasila menurutnya ideologi negara yang sangat ideal dan pantas di dalam negara, karena menurutnya apabila ideologi dikaitkan dengan agama khususnya Islam maka disana tentu akan terjadi pendiskriminasian terhadap agama lain.

## **B. Pandangan Islam Terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Islam dan Negara**

Allah SWT telah menurunkan risalah Islam. Dia menjadikan risalah tersebut berdiri di atas landasan akidah Tauhid, yaitu akidah *La Ilahi Illa Allah, Muhamada*

*Rasulullah*. Islam merupakan risalah paripurna dan universal. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta hubungan antara kehidupan itu dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Begitu pula Islam juga telah membawa aturan paripurna, yang mampu menyelesaikan seluruh problem, interaksi di dalam negara dan masyarakat, baik dalam masalah pemerintahan, ekonomi, sosial pendidikan maupun politik.<sup>4</sup>

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk umat manusia dengan tuntutan hidup yang serba sempurna agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>5</sup> Agama berbentuk kesatuan yang mengumpulkan semua bahan hidup dan kehidupan yang diperlukan oleh manusia. Maka pengaturan menurut ajaran Islam mengandung pesan-pesan moral untuk mengatur kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan, bukan untuk dunia semata tetapi diikat menjadi satu dengan kehidupan akhirat yang berarti hidup dalam bimbingan dan kekuasaan Allah. Karena itu, Islam telah mengatur dan meletakkan sesuatu pada tempatnya menurut keadaan dan kebutuhan hidup. Seorang Muslim hidup di atas dunia ini sepenuhnya dengan cita-cita hendak menjadi seorang hamba Allah dalam arti yang sepenuhnya, mencapai kejayaan di dunia dan kemenangan di akhirat. Untuk mencapai tujuan yang mulia itu, Tuhan memberi bermacam-macam aturan yang harus berlaku untuk berhubungan dengan Tuhan, dan aturan cara kita harus berlaku dan berhubungan dengan sesama manusia. Di antara aturan-aturan yang berhubungan dengan Tuhan,

---

<sup>4</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2002). h. 1-2

<sup>5</sup>Yunus Ali-Muhdar, *Toleransi-toleransi Islam Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Lawan-lawannya*, (Bandung: Iqra, 1983), h. 3

dan aturan cara kita harus berlaku dan berhubungan dengan sesama manusia. Di antara aturan-aturan yang berhubungan dengan muamalah (hubungan sosial) sesama makhluk, ada diberikan garis besarnya berupa kaidah yang berkenaan dengan hak dan kewajiban seseorang terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban masyarakat terhadap diri seseorang, yang terakhir ini tidak lebih dan tak kurang, ialah yang dinamakan orang sekarang dengan urusan kenegaraan. Namun yang sering dilupakan, ketika membicarakan urusan agama dan negara ialah pengertian Islam yang dinamakan dengan agama itu, Islam bukanlah semata-mata yang disebut peribadatan dalam istilah sehari-hari itu saja, seperti shalat dan puasa, tetapi yang dinamakan agama menurut pengertian Islam meliputi kaidah-kaidah, hudud-hudud (batasan-batasan) dalam muamalah (hubungan sosial) dalam masyarakat menurut prinsip yang telah ditetapkan Islam.<sup>6</sup>

Semua aturan-aturan itu terhimpun dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang ingin mengetahui pemahaman yang betul-betul terkait dengan kedudukan politik dalam Islam, maka langkah awal yang terpenting harus dilakukan adalah mengubah paradigma yang parsial dan sekuler tentang Islam. Seseorang tidak akan memperoleh pemahaman yang betul dan sempurna ketika ia memahami Islam secara parsial atau sekuler, yaitu ketika memaknai Islam tidak mengatur dan mengurus masalah keduniaan.

---

<sup>6</sup>M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 2001), h.

Islam lahir ke dunia sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam dengan diutusnya Rasul ke muka bumi ini. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ١٠٧)

Artinya: *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Al-Anbiya: 107)*<sup>7</sup>

Maka implikasi dari hal tersebut, Islam memiliki karakter yang *universal* dan *integral* (sempurna). *Universal* berarti Islam berlaku bagi segenap manusia, dan berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti. Selain itu Islam juga mempunyai karakter integralistik, ia mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, seperti aqidah, ibadah, muamalat, sosial ekonomi, pendidikan, seni, budaya, bahkan politik sekalipun.<sup>8</sup> Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة: ٣)

Artinya: *Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. (Al-Maidah: 3)*<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> At-Tanzil, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2005), h. 668

<sup>8</sup>Hasbiannor (0201135083), *Skripsi: Pandangan Hasan Al-Banna Tentang Partai Politik di Mesir Pada Masa Penjajahan Inggris*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Fakultas Syariah, 2006), h. 3

<sup>9</sup> At-Tanzil, *Al-Quran dan Terjemahnya*, *Op. Cit*, h. 6



Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman lagi membenarkan Rasul-Nya agar mereka memegang seluruh tali Islam dan Syariatnya serta menjalankan segala syariat-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya seoptimal mungkin.

Dari pengertian itu semuanya mendapat tempat dalam Islam. Atas dasar itulah maka tidak heran ketika ulama Kontemporer terkemuka Yusuf Qardawi pernah berkata bahwa Islam adalah Aqidah dan Ibadah, tanah air dan kebangsaan, toleransi dan kekuatan, moral, dan materi, kultur dan undang-undang.<sup>10</sup> Ketika Islam sudah sebagaimana kerangka di atas, maka akan diperoleh pemahaman yang sama bahwa Islam adalah agama yang komprehensif (menyeluruh). Seiring dengan karakter Islam yang *mutakamil* (sempurna dan integral), maka ia pun tidak hanya menyentuh aspek aqidah dan ibadah semata, akan tetapi ia menyentuh seluruh aspek lainnya dalam kehidupan manusia dengan cara metode yang sesuai dengan Islam. Baik itu sosial, ekonomi, pendidikan, seni dan budaya bahkan politik sekalipun.

Mengenai hal tentang Islam dan negara, Islam tidak bisa dipisahkan dari negara. Secara tegas dapat dikatakan Islam adalah agama dan negara, sebuah agama

---

<sup>10</sup>Yusuf Qardawi, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam, alih bahasa Ali Maktum Assalami*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1994), h. 87

yang menjadi sumber aturan hukum dan inspirasi.<sup>11</sup> Tatanan politik (negara) Islam adalah *khilafah*, yakni suatu pemerintahan berdasarkan Islam.<sup>12</sup>

Khalifah adalah sistem politik Islam. Khalifah tidak sama dengan sistem demokrasi. Salah satu prinsip penting dari khalifah, yang sekaligus membedakan dari sistem lainnya adalah bahwa kedaulatan, yakni hak untuk menetapkan hukum yang menentukan halal dan haram, ada di tangan Syariah, bukan di tangan manusia. Karena itu baik khalifah maupun umat, sama-sama terikat kepada syariah Islam. Khalifah wajib menerapkan Syariah Islam dengan benar sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Quran As-Sunnah. Tidak boleh sesuka hatinya, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah:<sup>13</sup>

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة: ٤٤)

Artinya: *Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. (Al-Maidah:44)*<sup>14</sup>

Sementara, dalam sistem demokrasi kedaulatan ada di tangan manusia, bukan di tangan Allah SWT, Dzat yang maha menciptakan manusia dan alam semesta. Dengan nama kebebasan, sistem demokrasi telah membuat manusia, sebagai

---

<sup>11</sup>A. Gaffar Aziz, *Berpolitik Untuk Agama; Misi Islam, Kristen dan Yahudi Tentang Politik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) Cet. 1, h. 49

<sup>12</sup>Adeng Muchtar Ghazali, *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam*, (Bandung: Benang Merah Press, 2004) h. 29

<sup>13</sup>*Hizbut Tahrir Indonesia, Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, 2009. h. 15

<sup>14</sup> At-Tanzil, *Al-Quran dan Terjemahnya, Op. Cit*, h. 222

tuhan yang merasa berwenang menetapkan hukum sesuai keinginan mereka. Suara mayoritas menjadi penentu kebenaran, betapapun buruknya sebuah keputusan atau pemikiran itu seakan telah menjadi benar. Atas dasar kedaulatan dalam Islam, maka secara otomatis ia melahirkan konsep bahwa poros kesetiaan hanyallah Allah. Ditegaskan dalam Al-Quran:<sup>15</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nissa:59)*<sup>16</sup>

Ayat di atas menciptakan landasan bagi keseluruhan sistem agama, politik, sosial dan budaya Islam serta membentuk prinsip dasar dari kontitusi Islam. Prinsip-prinsip dasar itu antara lain:

- a. Satu-satunya objek ketaatan kita sejati adalah Allah, kedaulatan sejati. Dia sendirilah yang harus ditaati sesuai dengan hak-Nya sendiri. Seorang Muslim hanyalah subyek Tuhan, abdi-Nya. Oleh karena itu, poros kesetiaan dan ketaatan Muslim dalam kehidupan individu dan kelompoknya hanyallah Tuhan semata.

---

<sup>15</sup> Adeng Muchtar Ghazali, *Op, Cit* h. 35

<sup>16</sup> At-Tanzil, *Al-Quran dan Terjemahnya, Op. Cit*, h. 168

- b. Dasar fundamental kedua bagi tatanan Islami adalah kesetiaan serta ketaatan terhadap Rasul. Ketaatan ini tidak dituntut oleh Rasul sendiri tetapi sebagai salah satu konsekuensi logis dari ketaatan terhadap Tuhan. Rasul ditaati karena dia merupakan satu-satunya sumber otentik (sah) semua petunjuk dan perintah Tuhan dengan cara menaati Rasul-Nya.
- c. Prinsip ketiga tentang ketaatan muslim dalam tatanan
- d. Kehidupan Islam adalah *Ulul Amri*, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan, pemerintah. *Ulul Amri* dibentuk dari kalangan muslim sendiri. Ketaatan terhadap prinsip ketiga ini (*Ulul Amri*), harus muncul atas dasar ketaatan terhadap prinsip yang pertama (taat kepada Allah) dan ketaatan terhadap prinsip yang kedua (taat kepada Rasul).
- e. Prinsip keempat yang terungkap dari ayat Al-Quran tersebut adalah bahwa dalam suatu negara berdasarkan Islam, perintah Tuhan dan Sunnah Rasul merupakan otoritas akhir. Jika terjadi perbantahan di kalangan orang-orang atau antara rakyat dengan pemerintah, maka mereka harus kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul, dan apapun keputusan pengadilan, keduanya harus diikuti tanpa syarat. Prinsip inilah yang menjadi karakteristik sekaligus pembeda antara negara bukan Islam dengan negara yang berdasarkan Islam, yakni pengakuan atas otoritas akhir dari Tuhan dan Rasul-Nya.
- f. Ayat tersebut juga memberi hak kepada rakyat untuk berbeda pendapat dengan pemerintah mereka dan merupakan ciri kebebasan berpolitik mereka. Tetapi dalam hal terjadinya perdebatan di antara mereka. Tetapi dalam hal terjadinya

perdebatan diantara mereka, maka keputusan Allah dan Rasulnya-Nya harus diterima sebagai keputusan akhir, baik oleh pemerintah maupun yang diperintah.

Islam adalah agama universal, oleh karenanya tidak bisa dibatasi oleh sebidang wilayah tertentu. Begitu juga, Islam tidak mencari atau kelompok tertentu tetapi seluruh manusia.

Al-Quran menguraikan secara gamblang tentang teori Islam mengenai negara,<sup>17</sup> misalnya dalam salah satu surah An-Nur yang menegaskan:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ  
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ٥٥)

Artinya: *Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. (An-Nur: 55)*<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Adeng Muchtar Ghazali, *Op, Cit* h. 29

<sup>18</sup> At-Tanzil, *Al-Quran dan Terjemahnya, Op. Cit*, h. 24

Menurut Al-Maududi, ayat di atas memberikan dua hal yang mendasar, yakni:

1. Masalah pertama adalah bahwa Islam menggunakan istilah ke-*khalifah*-an, bukannya kedaulatan. Karena menurut Islam kedaulatan hanya milik Tuhan saja, siapapun yang memegang tampuk kekuasaan dan siapapun yang memerintah sesuai dengan hukum Tuhan pastilah merupakan *khilafah* dari penguasa tertinggi dan tidak akan berwenang mengerahkan kekuasaan apapun kecuali kekuasaan-kekuasaan yang telah didelegasikan kepadanya.
2. Masalah kedua yang dimunculkan oleh Al-Quran tersebut adalah bahwa kekuasaan untuk memerintah bumi telah dijanjikan kepada seluruh masyarakat Muslim. Ayat tersebut tidak menyatakan bahwa orang atau kelompok tertentu dari kalangan-Nyalah yang akan meraih kedudukan ini.<sup>19</sup>

Dari uraian-uraian di atas jelaslah pandangan Abdurrahman Wahid tidak sejalan dengan pandangan Islam mengenai hubungan Islam dan negara, Abdurrahman Wahid secara jelas memisahkan Islam dan negara yang mana menurut Abdurrahman Wahid bahwa di dalam Islam itu tidak mengatur dan mengenal bahkan tidak mempunyai konsep tentang Islam dan negara atau pemerintahan, namun di dalam pandangan Islam, Islam itu sudah mengatur segala hal termasuk antara Islam dan negara. Islam memiliki karakter yang *universal* dan *integral* (sempurna). *Universal* berarti Islam berlaku bagi segenap manusia, dan berlaku sepanjang zaman sampai

---

<sup>19</sup> *Ibid* h. 29-30

hari kiamat nanti. Selain itu, Islam juga mempunyai karakter integralistik, ia mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, seperti aqidah, ibadah, muamalat, sosial ekonomi, pendidikan, seni, budaya, bahkan politik sekalipun.

Berdasarkan ini, maka seluruh hukum-hukum Islam tanpa kecuali harus diterapkan kepada manusia, sebagai konsekuensi adanya iman atau Aqidah Islamiyah. Dan karena hukum-hukum Islam ini tidak dapat diterapkan secara sempurna kecuali dengan adanya sebuah institusi negara, maka keberadaan negara dalam Islam adalah suatu keniscayaan. Karena itu, formulasi hubungan agama-negara dalam pandangan Islam dapat diistilahkan sebagai hubungan yang positif, dalam arti bahwa agama membutuhkan negara agar agama dapat diterapkan secara sempurna.<sup>20</sup>

Agama tak dapat dipisahkan dari negara. Agama mengatur seluruh aspek kehidupan melalui negara yang terwujud dalam konstitusi dan segenap undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Maka dari itu, tak heran banyak pendapat para ulama dan cendekiawan Islam yang menegaskan bahwa agama-negara adalah sesuatu yang tak mungkin terpisahkan. Keduanya ibarat dua keping mata uang, atau bagaikan dua saudara kembar (*tau`amaani*). Jika dipisah, hancurlah perikehidupan manusia.

Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Al Iqtishad fil I'tiqad* berkata: “*Karena itu, dikatakanlah bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah*

---

<sup>20</sup><http://laodesabaruddin.wordpress.com/2009/01/05/hubungan-agama-negara-dalam-pandangan-islam/> (14-12-2010)

*penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang lenyap.*<sup>21</sup>

Tuduhan bahwa Islam tidak mengatur tentang pemerintahan merupakan penyesatan dan pengingkaran atas realitas yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tersebar dalam berbagai kitab hadis atau kitab sejarah bahwa Muhammad SAW pernah mengangkat para wali (gubernur) untuk berbagai wilayah seperti Mu'adz bin Jabal sebagai wali di Yaman dan Al-Ula bin Hadhrami wali di Bahrain. Beliau juga pernah mengangkat para hakim seperti 'Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-'Asy'ari. Beliau juga pernah mengangkat 'Abdullah bin Rawahah menjadi pengawas tanah pertanian Khaibar.<sup>22</sup>

Sebagai agama sempurna, sesungguhnya Islam telah mengatur seluruh perikehidupan manusia tanpa kecuali. Tak ada satupun persoalan hidup yang terjadi pada manusia, kecuali Islam telah menjelaskan tata aturannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 89 yang mana artinya berbunyi "*Dan telah Kami turunkan kepadamu (Muhammad) Al Kitab (Al Qur'an) menjelaskan segala sesuatu.*"<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*, <http://laodesabaruddin.wordpress.com/2009/01/05/hubungan-agama-negara-dalam-pandangan-islam/>

<sup>22</sup> <http://politisi.blogspot.com/2007/08/reformulasi-hubungan-agama-negara.html> (14-12-201

2010) <sup>23</sup><http://al-fatih.blogspot.com/2008/06/ideologi-islam-menghadapi-tantangan.html>(14-12-



Berdasarkan kenyataan adanya reduksi Islam itu, diperlukanlah upaya untuk mengembalikan Islam pada posisinya yang sebenarnya sebagai pengatur seluruh aspek kehidupan manusia.